ANALISIS KIOS PANGAN DALAM MENINGKATKAN AKSES PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Henrico Roberta Veonardo[1)], Rizka Dinari[2)], dan Nur Hadi Prasetya[3)]

[1]Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281
[2]Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Universitas Gadjah Mada, 55281
[3]Teknologi Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Yogyakarta, 55165

E-mail: rizka.dinari@ugm.ac.id

Abstract

The Special Region of Yogyakarta faces inter-regional economic disparities that potentially affect public access to food. The Kios Pangan initiative represents a form of government intervention aimed at providing quality food at affordable prices. Therefore, this article analyzes the implementation of the Kios Pangan program as an effort to improve public access to food in the Special Region of Yogyakarta. A descriptive approach was employed—utilizing interviews, reviews of secondary data and documents, and field observations—to evaluate the program's implementation. The analysis indicates that the Kios Pangan program, managed by the Yogyakarta Special Region Agriculture and Food Security Agency (DPKP DIY), has the potential to enhance public access to food; however, challenges remain regarding implementation, such as commodity availability, geographic reach, and the branding or identity of the kiosks themselves. Consequently, optimizing the implementation of the Kios Pangan program is essential to making a positive contribution to public access to food in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Food Accessibility; Food Security; Logic Model; Kios Pangan*

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi ketimpangan ekonomi antarwilayah yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan. Inisiatif Kios Pangan merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis pelaksanaan program Kios Pangan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan deskriptif dilakukan melalui wawancara, telaah data sekunder atau dokumen, serta observasi lapangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Kios Pangan, yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY), memiliki potensi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketersediaan komoditas, jangkauan geografis, serta aspek branding atau identitas kios itu sendiri. Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan program Kios Pangan menjadi hal yang penting untuk memberikan kontribusi positif terhadap akses masyarakat terhadap pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Aksesibilitas Pangan; Ketahanan Pangan; Logic Model; Kios Pangan

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi masyarakat. (Repbulik Indonesia, 2012) Salah satu aspek penting mewujudkan ketahanan pangan ialah aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan sertiap orang dalam memperoleh pangan secara ekonomi, fisik, dan sosial. Akses ekonomi dipengaruhi oleh faktor pendapatan, kesempatan kerja, maupun harga pangan. Akses fisik berkaitan dengan kondisi wilayah maupun ketersediaan sarana dan prasarana distribusi pangan. Selain itu, akses sosial berkaitan dengan preferensi dan penerimaan masyarakat terhadap jenis pangan tertentu. (Badan Pangan Nasional, 2026) Berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas pangan dipengaruhi faktor yang saling berkaitan dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih terdapat 8,27% masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan pada tahun 2024. (Badan Pusat Statistik, 2025) Selain itu, data *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) menunjukkan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat mencapai 4,02%. (Badan Pusat Statistik, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pangan masyarakat Indonesia belum tercapai secara merata di seluruh wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi kesenjangan kondisi ekonomi antarwilayah yang berpotensi memengaruhi akses pangan masyarakat. Persentase penduduk miskin Sleman (6,71%) dan Kota Yogyakarta (6,14%) berada di bawah rata-rata DIY, sedangkan persentase penduduk miskin Kulonprogo (14,53%), Gunungkidul (14,15%), dan Bantul (11,54%) berada di atas rata-rata DIY. (Badan Pusat Stastistik Provinsi DIY, 2025) Perbedaan kondisi ekonomi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan masyarakat di DIY untuk mengakses pangan dengan layak.

Permasalahan akses pangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun juga oleh faktor fisik yang berkaitan dengan kondisi wilayah dan kelancaran ditribusi pangan.Tingginya frekuensi kejadian bencana di DIY juga berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan aksesibilitas pangan yang merata di masyarakat. Berdasarkan data BPBD, pada tahun 2024 terjadi 951 kali bencana, meliputi cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, kebakaran, kekeringan, hingga gempa. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, 2025) Kejadian tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi

pangan, merusak infrastruktur, hingga mempengaruhi produksi pangan yang akhirnya berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan pada masyarakat.

Berbagai permasalahan ekonomi dan fisik yang mempengaruhi akses pangan menunjukkan perlu adanya intervensi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah DIY melalui DPKP ialah penyelenggaraan Kios Pangan. Tujuan khusus dari Kios Pangan ialah menyediakan bahan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis.

Dalam implementasinya, Kios Pangan menggandeng berbagai pihak, seperti petani, perternak, distributor, Perum Bulog, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha lainnya untuk penyediaan komoditas pangan. Meskipun menjadi salah satu intervensi yang berpotensi meningkatkan akses pangan, Kios Pangan perlu dianalisis untuk mengetahui perannya dalam mengatasi permasalahan akses pangan masyarakat khususnya di DIY. Oleh karena itu, artikel penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kios Pangan DPKP DIY sebagai upaya peningkatan akses pangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Proses analisis ini dilakukan sebagai bagian dari Praktik Kesehatan Masyarakat Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi dan Kesehatan Universitas Gadjah Mada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY pada 6 April - 6 Juni 2026 yang telah mendapatkan izin secara resmi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan Kios Pangan yang berpotensi meningkatkan akses pangan masyarakat di DIY. Kios Pangan menjadi salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah DIY melalui DPKP DIY di bawah naungan Badan Pangan Nasional untuk menydiakan pangan pokok strategis dengan harga terjangkau dan berkualitas.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, telaah data sekunder/dokumen dan observasi lapangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kios Pangan. Wawancara dilakukan kepada sejumlah dua orang staf DPKP DIY yang ikut bagian dalam pengelolaan Kios Pangan dan tiga orang staf Kios Pangan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan Kios Pangan, serta wawancara kepada masyarakat yang mengakses Kios Pangan sebanyak 25 orang untuk mendapatkan respon terkait

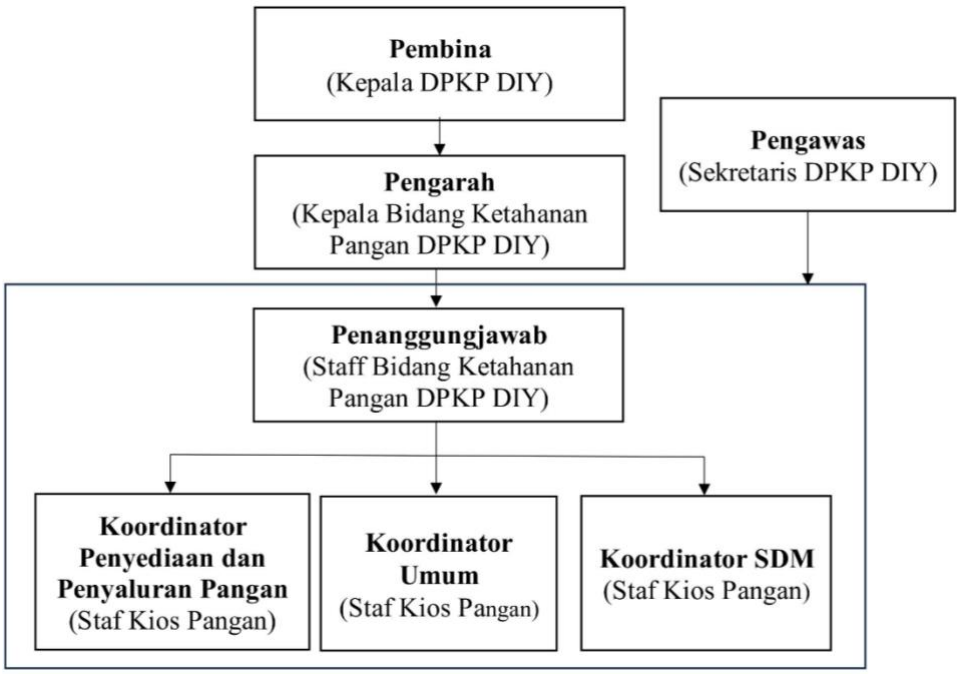
pelaksanaannya. Pemilihan masyarakat sebagai informan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya masyarakat yang datang langsung dan membeli komoditas pangan di Kios Pangan serta beredia menjadi informan. Hasil wawancara dilakukan analisa secara tematik berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian.

Telaah data/dokumen dilakukan pada laporan penjualan Kios Pangan periode bulan Januari hingga April 2026 untuk menganalisis tren penjualan komoditas pangan serta petunjuk teknis Kios Pangan yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional untuk menganalisis detail panduan pelaksanaan. Observasi lapangan dilakukan saat kegiatan Bazar Pangan Murah maupun operasional Kios Pangan di Kantor DPKP DIY pada tanggal 28 dan 30 April 2026, 13 Mei 2026, dan 20 - 21 Mei 2026. Seluruh hasil analisis akan dibagi menjadi beberapa sub pembahasan, diantaranya struktur organisasi Kios Pangan, pelaksanaan Kios Pangan, dan pendekatan *logic model.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Kios Pangan

Berikut ini organisasi pelaksanaan dari Kios Pangan yang dikelola oleh DPKP DIY:



Gambar 1. Organisasi Pelaksanaan Kios Pangan
(Sumber: Petunjuk Teknis Kios Pangan 2026)

Struktur organisasi pelaksanaan Kios Pangan DPKP DIY di atas merujuk pada petujuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Berikut ini tugas setiap komponen organisasi sebagai berikut (Badan Pangan Nasional, 2026) :

1. Pembina

   Pembina memiliki tugas untuk memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kios Pangan berupa advokasi dan koordinasi.

2. Pengawas

   Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, seperti advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama.

3. Pengarah

   Pengarah memiliki tugas untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan, seperti advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama.

4. Penanggungjawab

   Penanggungjawab memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi kepada pemasok, mitra, dan konsumen serta memantau, memonitor, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan.

5. Koordinator penyediaan dan penyaluran pangan

   Koordinator penyediaan dan penyaluran pangan memiliki tugas untuk menyusun perencanaan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan stok Dan kontinuitas pasokan serta melaksanakan pengelolaan stok, pengembalian komoditas pangan dan pergudangan.

6. Koordinator Umum

   Koordinator umum memiliki tugas untuk mengelola administrasi, data dan informasi Kios Pangan serta mengkoordinir kegiatan terkait (sortasi, pengemasan, bongkar muat).

7. Koordinator SDM

Koordinator SDM memiliki tugas untuk Menyusun perencanaan, mengkoordinasikan, memgevaluasi, dan mengawasi SDM dan perlengkapan dalam operasional Kios Pangan.

Berdasarkan hasil observasi terkait organisasi pelaksana Kios Pangan terdapat dua hal penting, Pertama, pelaksanaan organisasi pelaksana telah berjalan dengan baik dimana laporan penjualan maupun kepentingan administrasi telah berjalan secara berjenjang. Laporan dibuat berdasarkan fakta di lapangan oleh tiga koordinator lapangan lalu diteruskan ke penanggungjawab, pengarah, dan terakhir ke pembina. Manfaatnya tentu mengefisiensikan waktu dan akurasi data sehingga pelayanan berjalan dengan baik dan informasi yang diberikan valid. Kedua, terdapat keterbatasan dimana di saat tertentu terjadi kekurangan SDM di lapangan saat kegiatan Bazar Pangan Murah. Hal ini berdampak pada penenalan program Kios Pangan terhadap pembeli belum tercover dengan baik dan cakupan wilayah kegiatan Bazar Pangan Murah menjadi terbatas. Jika organisasi pelaksana Kios Pangan tidak dapat berjalan dengan baik tentu akan berisiko terhadap aksesibilitas pangan yang pada akhirnya masyarakat berpotensi melakukan stratgi koping seperti pemilihan makanan yang kurang sesuai dengan standar. (Kholidah et al., 2023)

Pelaksanaan Kios Pangan

Berikut ini detail pelaksanaan dan ragam komoditas Kios Pangan yang dilaksanakan oleh DPKP DIY :



Gambar 2. Lokasi Kios Pangan di DPKP DIY
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)



Gambar 3. Ragam Komoditas di Kios Pangan DPKP DIY
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)



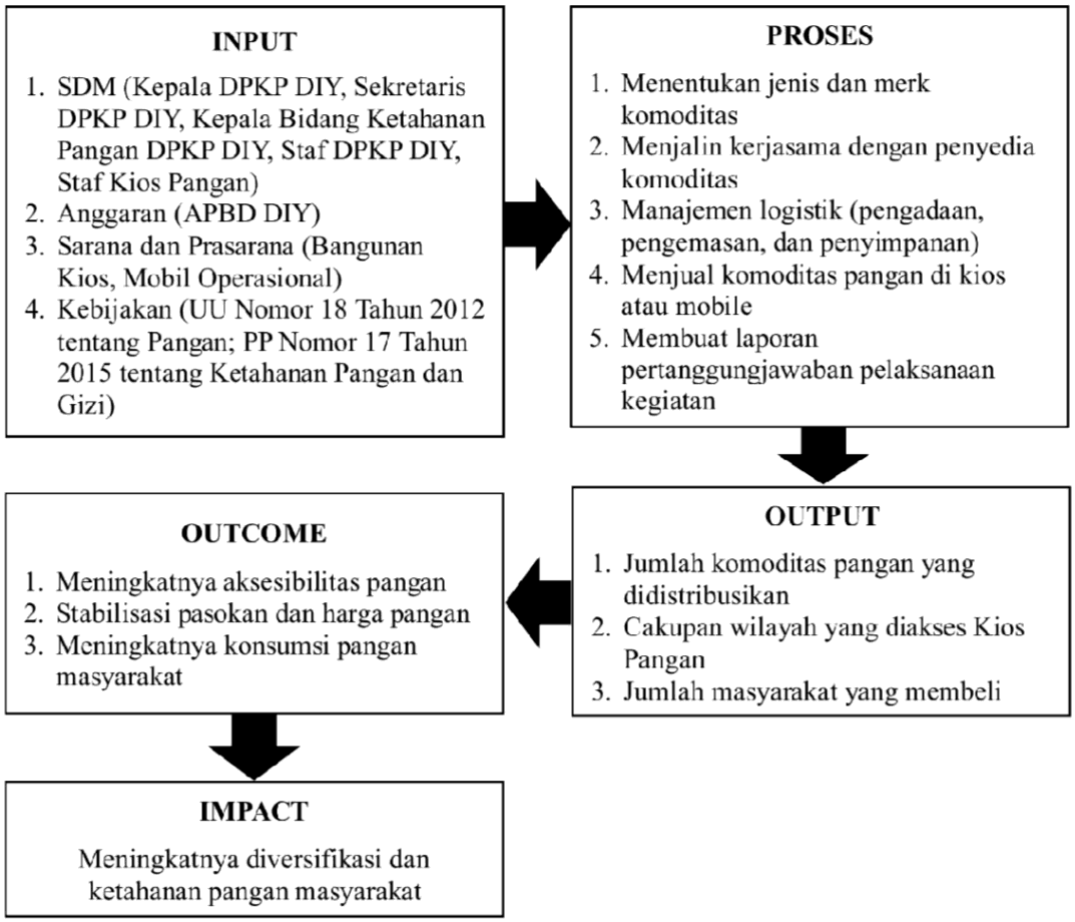
Gambar 4. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah oleh Kios Pangan DPKP DIY
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)



Gambar 5. Ragam Komoditas Pangan di Bazar Pangan Murah
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)

Pendekatan *Logic Model*

Berikut ini hasil analisis berdasarkan pendekatan *logic model* dari Kios Pangan :



Gambar 6. *Logic Model* Kios Pangan

Input dari pelaksanaan Kios Pangan diantaraya SDM, anggaran, sarana dan prasarana, kebijakan, serta data terkait. SDM terdiri dari beberapa staf DPKP DIY dan staf Kios Pangan. Selanjutnya, APBD DIY digunakan untuk operasional Kios Pangan, seperti transportasi, penyediaan sarana dan prasarana, hingga mengadakan *event* (Bazar Pangan Murah, Pasar Lumbung Pangan). Sarana dan prasarana Kios Pangan berupa kios fisik yang masih berada satu lingkungan dengan DPKP DIY serta 1 mobil dan 1 truk untuk mobilitas. Dasar pelaksanaan kegiatan Kios Pangan ialah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pada tahap *process* sendiri terbagi menjadi tiga tahap, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Pada tahap perencanaan, Kios Pangan melakukan observasi langsung jenis dan merk komoditas yang potensial untuk dijual. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan *stakeholder* untuk pengadaan komoditas pangan. Namun dua langkah ini bisa dilewatkan jika hanya fokus untuk pembaharuan stok produk. Selanjutnya dilakukan manajemen logistik dengan melakukan pengadaan dan penyimpanan produk. Pada tahap pelaksanaan, berupa penjualan komoditas pangan ke masyarakat baik secara langsung di kios maupun melalui *event*, seperti Pasar Tani, Bazar Pangan Murah, Pasar Lumbung Pangan.

Tabel 1
Laporan Penjualan Kios Pangan Periode Januari - April 2026

Jenis Pangan	**Jumlah Penjualan**				**TOTAL**
	Januari	**Februari**	**Maret**	**April**	
Beras Medium	435	255	458	166	1314
Beras Premium	12	41	28	11	92
Beras SPHP	79	54	0	0	133
Beras Lain	18	32	3	19	72
Minyak Goreng	584	578	617	465	2244
Gula Pasir	308	581	1.379	328	2596
Telur Ayam	272	239	265	200	976
Bawang	369	856	852	315	2392
Daging Ayam	0	0	0	0	0
Daging Sapi	0	0	0	0	0
Cabe	0	0	0	0	0
Komoditas Tambahan (Kecap)	186	501	177	121	985
Frozen Food	91	42	12	48	193
Produk Olahan	11	9	5	1	26

Produk UMKM (Kunir Asem)	22	34	34	26	116
Komoditas Lain (Makanan Kecil)	398	43	320	452	1213

(Sumber: Kios Pangan DPKP DIY)

Output dari pelaksanaan Kios Pangan, diantaranya ketersediaan komoditas pangan, cakupan wilayah yang diakses, dan jumlah masyarakat yang membeli. Terdapat beberapa jenis komoditas dengan penjualan tinggi hingga stok cepat habis, diantaranya telur ayam, telur bebek, gula, dan minyak goreng. Hal ini seperti yang tergambarkan dalam tabel laporan penjualan di atas dimana produk-produk tersebut memiliki tingkat penjualan yang tinggi pada periode Januari - April 2026. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan ketersediaan stok yang baik untuk memaksimalkan penjualan. (Sugiartama & Purnama, 2022) Cakupan wilayah dari pelaksanaan Kios Pangan fokus di area perkotaan karena menyesuaikan anggaran operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sarianti dkk (2025) dimana keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam menjalankan sebuah program. Untuk jumlah masyarakat yang membeli di Kios Pangan lebih tinggi ketika Bazar Pangan Murah di kelurahan atau Pasar Tani di halaman DPKP DIY dibandingkan langsung mendatangi kios secara langsung. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan identitas agar Kios Pangan dikenal lebih luas untuk menjaga eksistensinya tanpa harus bergantung pada kegiatan yang lebih dikenal masyarakat. (Miranda et al, 2025)

Outcome dari pelaksanaan Kios Pangan, diantaranya meningkatnya aksesibilitas pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta meningkatnya konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan aksesibilitas pangan dapat terjadi melalui kehadiran Kios Pangan yang menyediakan berbagai komoditas pangan dengan lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyediaan komoditas pangan dengan harga relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Ketersediaan beragam komoditas pangan juga berpotensi mendukung peningkatan konsumsi pangan lebih baik.

Impact dari pelaksanaan Kios Pangan ialah meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. (Kementerian Dalam Negeri RI, 2019). Melalui peraturan ini, integrasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan dan keuangan daerah memiliki peran penting untuk mencapai target dengan ideal. Terjadinya peningkatan skor

Pola Pangan Harapan (PPH) DIY tahun 2025 mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi yang lebih bergam dan seimbang. Bahkan sejak tahun 2021 tidak ada lagi daerah yang sangat rentan pangan di wilayah DIY. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, 2025)

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kios Pangan DPKP DIY berpotensi meningkatkan akses pangan masyarakat melalui penyediaan pangan pokok strategis dengan harga terjangkau. Berdasarkan pendekatan *logic model*, implementasi program telah berjalan sistematis, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketersediaan komoditas pangan, cakupan wilayah, dan identitas Kios Pangan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan Kios Pangan untuk perbaikan akses pangan masyarakat di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional. (2026). *Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Melalui Kios Pangan Tahun 2026*. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Badan Pusat Stastistik Provinsi DIY. (2025). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota*. https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html. 23 April 2026

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2024*. ps://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NCMy/prevalensi-penduduk-dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan.html

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. (2025). *Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 2025*. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri RI.

Kholidah, L. N., Pangestuti, D. R., Lisnawati, N., & Fairus, A. (2023). Pengaruh AKsesbilitas Bahan Pangan terhadap Praktik Pemilihan Makanan Keluarga di Kota Semarang selama Masa Pandemi. *Amerta Nutrition*, *7*(2), 238–246.

Miranda, Jumaira, & Maleha, N. Y. (2025). Analisis Pengaruh Strategi Branding dalam Membangun Citra Merek yang Kuat. *Jurnal Bisnis Manajemen*, *3*(2), 475–484.

Repbulik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Kementerian Sekretariat Negara RI.

Sarianti, Affrian, R., & Dharma, A. S. (2025). Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, *2*(3), 1415–1424.

Sugiartama, K. S. R., & Purnama, N. L. P. S. (2022). Analisis Ketersediaan Stok Barang Terhadap Volume Penjualan di Canggu Shop. *Prosiding SINTESA*, *5*, 387–394.